Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 1 Juli 2024

Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru

Sisbhilla Rannita[1] dan Raden Imam Al Hafis[2]

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
sisbhilarannita@student.uir.ac.id imamalhafiz@soc.uir.ac.id

Received : March 13, 2024;
Accepted : 30 Juli 2024

Abstract

This research aims to analyze and explain Collaborative Governance in the Implementation of a Kota Layak Anak in Pekanbaru City. This type of research is descriptive qualitative. This research has four indicators, namely Initial Conditions, Institutional Design, Facilitative Leadership and Collaborative Process. Types and techniques of data collection consisting of interviews, observation and documentation. The data analysis technique used is Interactive Data Analysis. The results of research on Collaborative Governance in Implementing a Kota Layak Anak in Pekanbaru City, namely that clear basic rules are still not optimal, because the OPDs involved in this collaboration are still adhering to the Mayor's Decree and there are no rules that underlie this collaboration, furthermore, face-to-face dialogue is still ongoing. has not been carried out optimally because there are still OPDs involved in this collaboration that are less active and DP3APM Pekanbaru City as the OPD in charge of this collaboration has not carried out an optimal evaluation of the OPDs involved and there are OPDs that are not of icially involved in this collaboration namely the Pekanbaru City Center for Gender and Child Studies (PSGA). Suggestions for DP3APM Pekanbaru City as the OPD forgiving in implementing a Kota Layak Anak in Pekanbaru City is to provide clear basic rules regarding the implementation of Kota Layak Anak collaboration in Pekanbaru City in the form of signing an MoU by each OPD involved. City.
Keywords: Collaborative Governance, Implementation, Child Friendly City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini memiliki empat indikator, yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan Fasilitatif dan Proses Kolaboratif. Jenis dan teknik pengumpulan data yang terdiri dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Data Interaktif. Hasil penelitian Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yaitu Aturan Dasar Yang Jelas masih belum optimal, karena OPD-OPD yang terlibat pada kolaborasi ini masih berpegang pada Surat Keputusan Walikota dan belum terdapat aturan yang melandasi kolaborasi ini, selanjutnya dialog tatap muka masih belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat OPD-OPD yang terlibat pada kolaborasi ini yang kurang aktif dan DP3APM Kota Pekanbaru sebagai OPD Pengampu dalam kolaborasi ini belum melakukan evaluasi dengan optimal kepada OPD-OPD yang terlibat serta terdapat OPD yang tidak terlibat secara resmi pada kolaborasi ini yaitu Pusat Studi Gender dan Anak Kota Pekanbaru (PSGA). Saran untuk DP3APM Kota Pekanbaru sebagai OPD Pengampun dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru agar memberikan aturan dasar yang jelas mengenai penyelenggaraan kolaborasi Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru berupa penandatanganan MoU oleh setiap OPD yang terlibat.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Penyelenggaraan, Kota Layak Anak

Pendahuluan

Dalam sistem pemerintahan, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak warga negara secara bersama-sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh hukum, negara dan pemerintahan dalam rangka untuk menghormati dan melindungi martabat. Pemenuhan hak anak merupakan termasuk dalam hak asasi manusia dan harus mendapatkan perlindungan dari pelanggaran yang bisa merugikan anak. Anak merupakan generasi penerus yang memiliki nilai krusial bagi keberlanjutan dan kelangsungan peradaban dunia.

Menurut (Rahmayuni, 2017) ketidakmampuan anak dalam mempertahankan haknya karena ketidakmatangan mental dan fisiknya dari berbagai macam tindakan yang mengakibatkan kemunduran mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga memunculkan kebutuhan perlindungan anak melalui konstribusi dan komitmen pemerintah serta masyarakat untuk membangun sebuah kehidupan dan penghidupan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan perlindungan anak, Kota Layak Anak adalah salah satu program yang diresmikan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006. Kabupaten/kota Layak Anak memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui keterlibatan serta integrasi dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai berikut:

1. Kota Pekanbaru telah menyandang penghargaan sebagai Kota Layak Anak secara berturut-turut setiap tahunnya hingga saat ini. Namun, dilihat dari data bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru cenderung meningkat dari tahun 2020-2023 (DP3APM Kota Pekanbaru).
2. Belum optimalnya kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Silalahi administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informasi. Tata usaha juga sering diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan, atau yang dikenal dengan clerical work. Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-

sama, teratur dan terarah berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan kesepakatan bersama (Marliani, 2018).

Menurut (Anggara, 2016) administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan Menurut konsep (Andry & Yussa, 2020) administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya..

Konsep Organisasi

Menurut (Siagian, 2019) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. (Malawat, 2022) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang disebut atasan dan seseorang atau sekolompok orang yang disebut bawahan.

Sementara itu, Menurut (Winardi, 2009) organisasi adalah suatu sistem yang terjadi dari beberapa elemen atau subsistem, di antaranya subsistem manusia mungkin merupakan subsistem yang paling penting, dan di mana dapat diamati bahwa setiap subsistem berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Menurut beberapa pendapat para ahli di atas, organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan dan rangkaian interaksi yang dilakukan orang-orang dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Konsep Manajemen

Pandangan (Wijayanto, 2013) menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni, yang terdiri atas perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kinerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Menurut (Siagian, 2019) manajemen dapat didefinisikan sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain. Menurut (Andry & Yussa, 2020) manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pedoman umum yang diterapkan pada tingkat.

Konsep Governance

Secara umum, konsep governance juga lebih mengedepankan integritas karena harus menyampaikan atau melaporkan sesuatu apa adanya, tanpa harus direkayasa. Governance dapat juga dimaknai sebagai keterbukaan, karena ia harus bisa dilihat oleh siapa saja yang membutuhkannya. Selanjutnya, governance harus akurat karena dibutuhkan untuk mengukur sekaligus sebagai alat kontrol agar tidak terjadi penyimpangan, baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, governance dapat juga dipahami sebagai sebuah akuntabilitas

yang menjadi konsep etika bertanggungjawab (Mukrimaa et al., 2016).

Menurut Neumayer dalam (Mawarni, 2022) tata kelola pemerintahan (governance) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara.

Konsep Collaborative Governance

Istilah lain collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) yang mengatakan bahwa collaborative governance merupakan sebuah tahapan kerjasama di mana beberapa lembaga publik dan para pemangku kepentingan akan terlibat dalam mengendalikan keputusan dari sebuah proses pembuatan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang merujuk pada adanya komunikasi serta tindakan bersama dari para pemangku kepentingan (multi stakeholders). Pemangku kepentingan tersebut akan duduk bersama untuk mengambil sebuah keputusan publik yang merupakan hasil konsesus melalui sebuah proses secara tatap muka.

Bagi Ansell & Gash pemahaman tentang kolaboratif merupakan sebuah realitas dalam sebuah kerjasama di mana para aktor akan terlibat dalam berbagai misi dan memiliki arah pergerakan demi mencapai sebuah tujuan yang hendak didapat melalui proses kerjasama, menghormati kesepakatan yang sudah disepakati, saling menghargai serta membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dengan berbagai keterampilan dan kemampuan dari masing-masing instansi selama menjalankan kerjasama (Ansell & Gash, 2008).

Konsep Stakeholders

Menurut Hetifah Stakeholder merupakan individu, kelompok organisasi baik lakilaki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) dalam suatu program. Selanjutnya, Brysson mengartikan stakeholder sebagai individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumber daya atau hasil (output) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut (Sari, 2021).

Dari beberapa definisi stakeholders di atas penulis menyimpulkan bahwa stakeholders merupakan semua pihak baik itu individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam suatu kebijakan ataupun program untuk mencapai tujuan tertentu.

Kota Layak Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 menjelaskan bahwasannya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan sebuah kebijakan yang dapat memberikan jaminan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui program yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan para pemangku kepentingan yang berkomitmen melalui sistem yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak serta perlindungan bagi anak.

Kota Layak Anak tidak hanya penting untuk diselenggarakan, namun juga diwujudkan karena anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan bernegara serta sepertiga dari keseluruhan penduduk di Indonesia di isi oleh anak.

Metode

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah "Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru".

Metode Kualitatif menurut Johnny Saldana (2011) dalam (Sugiyono, 2020) merupakan payungnya semua jenis metode pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan sosial yang natural/alamiah. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Informasi dapat berupa transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen dan atau bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, vidio, bahan dari internet dan dokumen-dokumen lain tentang kehidupan manusia secara individual atau kelompok.

Hasil dan Pembahasan

A. Tanggapan Key Informan dan Informan Mengenai Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

1. Starting Conditions (Kondisi Awal)

Kondisi awal tidak hanya dapat mendukung terjadinya kolaborasi, namun juga dapat menghambat proses kolaborasi antar pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008) Kondisi awal ini terjadi ketika kolaborasi antar pemangku kepetingan memiliki tujuan yang sama yang ingin dicapai. Adanya peningkatan angka kasus anak korban kekerasan yang memberikan dampak negatif terhadap anak-anak dari berbagai aspek.

a. Kekuatan Pemangku yang Berbeda

   Untuk lebih jelasnya mengenai kekuatan pemangku yang berbeda dalam penyelenggaraaan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru peneliti mewawancarai key informan pada penelitian ini yaitu ibu Reli Sugianti, SKM di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan bahwa :

   "Tentu ada, maka dari itu kami selaku penegak diselenggarakannya Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini membentuk atau membuat tim gugus tugas yang terbagi menjadi beberapa klaster yang terdiri dari OPD-OPD yang memiliki tujuan yang sama dengan kami yakni memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dan juga setiap OPD-OPD tersebut terlibat dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru."

   Dari pernyataan yang disampaikan oleh key informan tersebut, bahwa dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak ini melibatkan berbagai stakeholders di dalamnya.

b. Insentif yang Dimiliki Pemangku Kepentingan

   Selanjutnya ibu Fajrina, S. IP Fungsional Perlindugan Anak/Panyuluh Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Jum'at, 1 Desember 2023. Beliau mengatakan bahwa :

"Tidak ada, sejauh ini DP3APM Kota Pekanbaru tidak pernah memberikan insentif berupa uang tetapi kami saling memotivasi sebagai OPD dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru ini."

Selain itu insentif yang mereka dapatkan juga berupa terjalinnya hubungan baik bagi sesama OPD yang terlibat dan membuat program yang selenggarakan mendapat penhargaan dan berjalan dengan baik setiap tahunnya.

c. Kerjasama Pemangku Kepentingan di Masa Lalu

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Susi Irwana, Amk Pengelola Data Sub Umum di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini pada hari Senin, 11 Desember 2023. beliau mengatakan :

"Ada, karena yang disebut anak itu mereka yang berusia dibawah 18 tahun. Jadi seringkali kita menemukan mereka-mereka yang terlibat penggunaan obat-obat terlarang. Maka dari itu, sebelumnya DP3APM memfasitilitasi mereka yang terlibat dengan adanya rehabilitasi dari kami tanpa menghilangkan hak-hak mereka sebagai anak. Untuk sekarang karena kita memang resmi terlibat, kita disini juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan evaluasi yang dilakukan oleh DP3APM Kota Pekanbaru."

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa OPD yang terlibat secara resmi pernah melakukan kolaborasi sebelumnya, terdapat OPD yang terlibat secara resmi tetapi tidak pernah berkolaborasi sebelumnya dengan DP3APM Kota Pekanbaru dan terdapat OPD yang yang berkolaborasi sampai saat ini tetapi tidak dilakukan secara resmi.

2. Institutional Design (Desain Kelembagaan)

Biasanya desain kelembagaan ini berkaitan dengan aturan dasar dalam melakukan kolaborasi.

a. Aturan Dasar yang Jelas

Selanjutnya ibu Fajrina, S. IP Fungsional Perlindungan Anak/ Penyuluh Sosial Ahli Muda di Dinas Sosial Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Jum'at, 1 Desember 2023. beliau mengatakan :

"Kalau untuk aturan dasar kolaborasi tidak ada, aturan tersebut di DP3APM sendiri kami hanya sebagai OPD yang mendukung dalam hal data dan kegiatan yang menjadi penilaian Kota Layak Anak di Dinas Sosial dan kemungkinan DP3APM juga telah menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Hal tersebut dapat kita lihat bahwasannya Predikat Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru setiap tahunnya meningkat"

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan masih belum memiliki aturan dasar yang jelas bagi sebagian OPD yang terlibat dan masih berpegang pada Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang menjadi dasar bahwa semua OPD yang terlibat merupakan OPD yang memang ahli di bidangnya masing-masing serta memiliki visi misi dan tujuan yang sama terkait anak.

b. Transparansi Proses

Selanjutnya disampaikan oleh bapak Hakim di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Senin, 26 Februari 2024. Beliau mengatakan bahwa :

"Untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak sendiri tentunya dilakukan secara terbuka seperti memberikan data yang diperlukan DP3APM akan tetapi dalam melakukan sidang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kita lakukan secara tertutup demi kepentingan anak tersebut."

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, maka dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan secara terbuka atau transparan oleh seluruh OPD-OPD Klaster V yang terlibat. Sebagai bentuk transparansi pada kolaborasi ini dimulai dari pemberian data oleh masing- masing OPD yang terlibat yang dibutuhkan oleh DP3APM Kota Pekanbaru terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

c. Melibatkan Peran Stakeholders

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan stakeholders serta stakeholders primer dan stakeholders sekunder dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, Hal ini disampaikan oleh ibu Reli Sugianti, SKM di DP3APM Kota Pekanbaru pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan sebagai berikut :

"Tentu saja, karena dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak ini kita berperan sebagai OPD pengampu dan kami tidak bisa menyelenggerakan Kota Layak ini sendiri. Untuk itu kita membentuk tim gugus tugas berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang terdiri dari berbagai klaster sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD yang terlibat."

Adapun yang menjadi stakeholders primer pada penelitian ini yaitu DP3APM Kota Pekanbaru sebagai OPD Pengampu pada kolaborasi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Sedangkan stakeholders sekunder pada penelitian ini yaitu OPD-OPD yang terlibat pada Klaster V dan OPD-OPD yang belum berkolaborasi secara formal atau resmi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (Fasilitatif Leadership)

a. Mediator

Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Reli Sugianti, SKM di DP3APM Kota Pekanbaru pada Kamis, 9 November 2023. Beliau mengatakan sebagai berikut :

"Peran kita sebagai mediator itu salah satunya yaitu sebagai OPD pengampu. Jadi sarana itu ada pada DP3APM agar kami saling berkolaborasi karena kalau DP3APM tidak ada bagaimana OPD-OPD lainnya mau menyelenggarakan Kota Layak Anak ini. Dan betuk mediator yang kami berikan kepada OPD-OPD yang terlibat yaitu

motivasi yang mana nantinya akan kami sampaikan di dalam RAKOR (rapat Koordinasi) dan Rapat Kerja Kota Layak Anak.''

Dari pernyataan yang disampaikan oleh key informan tersebut, dapat kita ketahui bahwa DP3APM Kota Pekanbaru telah membuktikan perannya sebagai mediator dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru dalam bentuk motivasi sebagai pemberdayaan yang diberikan kepada OPD-OPD yang terlibat didalamnya.

4. Proses Kolaboratif

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh ibu Susi Irwana, Amk Pengelola Data Sub Umum di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Senin, 11 Desember 2023. Beliau mengatakan :

"Ada, setahun itu kami lakukan rutin beberapa kali dan biasanya disebut rapat tim kerja. Jadi semua OPD yang terkait dengan kegiatan untuk menuju Kota Layak Anak itu dilibatkan."

Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, maka dapat disimpulkan bahwa dialog tatap muka yang dilakukan oleh OPD-OPD yang terlibat belum optimal.

Pekanbaru selaku informan pada penelitian ini hari Senin, 26 Februari 2024. Beliau mengatakan bahwa :

"Menurut kami sendiri sepertinya ada, tetapi bukan berarti OPD yang tidak aktif ini tidak bertanggung jawab atas perannya dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Melainkan kemungkinan peran mereka hanya sedikit."

Pemahaman bersama terlihat dari pengetahuan akan aturan serta tujuan kolaborasi yang perlu diketahui oleh anggota yang terlibat. Sesuai dengan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah diberikan narasumber selaku key informan dan informan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 449 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2025 pada Klaster V Perlindungan Khusus, maka dapat disimpulkan bahwa hasil sementara yang diperoleh dari dilakukannya kolaborasi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sudah cukup baik karena telah mampu menurunkan angka kasus anak korban kekerasan meskipun masih kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh OPD-OPD yang terlibat pada Klaster V ini serta terdapat OPD di luar Klaster V yang ikut serta dalam kolaborasi ini dan menanggulangi kasus anak korban kekerasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, menunjukkan bahwa Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru yang didapat peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi melalui 4 indikator

dan 12 sub indikator bahwa pada indikator Desain Kelembagaan dengan sub indikator Aturan Dasar Yang Jelas masih belum optimal, karena OPD-OPD yang terlibat pada kolaborasi ini masih berpegang pada Surat Keputusan Walikota dan belum terdapat aturan yang melandasi kolaborasi ini.

Selanjutnya pada Indikator Proses Kolaboratif dengan sub indikator dialog tatap muka masih belum dilakukan secara optimal karena masih terdapat OPD- OPD yang terlibat pada kolaborasi ini yang kurang aktif dan pada sub indikator Hasil Sementara DP3APM Kota Pekanbaru sebagai OPD Pengampu dalam kolaborasi ini belum melakukan evaluasi dengan optimal kepada OPD-OPD yang terlibat serta terdapat OPD yang tidak terlibat secara resmi pada kolaborasi ini yaitu Pusat Studi Gender dan Anak Kota Pekanbaru (PSGA). Akan tetapi, PSGA sering melakukan sosialisasi bersama DP3APM Kota Pekanbaru.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Al Hafis, R. I. (2023). Model Proses Collaborative Governance Dalam Rehabilitasi Penderita Kusta di Jawa Tengah. Semarang: UNDIP Semarang.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 77-87.

Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, *15*(1).

Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(1).

Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1), 137-155.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, *1*(2), 183-203.

Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, *10*(1), 49-58.

Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, *9*(3), 106-120.

Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of

collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, *6*(S4), 639-651.

Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *7*(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *2*(1), 27-39.

Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, *1*(2), 41-54.

Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, *1*(1), 26-36.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 198-205.

Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 207-223.

Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *4*(1), 17-35.

Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, *9*(3), 1458-1463.

Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *6*(4).

Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 190-197.

Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, *14*(1).

Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1), 44-54.

Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 1-10.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.

Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.

Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.

Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 77-87.

Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 66-79.

Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *12*(02), 194-205.

Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *12*(1), 18-28.

Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Stretegi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.

Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(2), 248-261.

Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *2*(2), 197-215.

Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative GovernanceIn Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, *13*(1), 164-173.

Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, *4*(2), 242-248.

Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *5*(2), 1180-1192.

Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 35-40.

Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 122-134.

Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, *1*(1), 22-29.

Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.

Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *9*(2), 81-90.

Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, *2*(2).

Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibity). *Sisi Lain Realita*, *2*(2), 39-53.

Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Doketer Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Asketik, 3 (2), 163–175.

Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, *4*(1), 90-102.

Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 89-101.

Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.

Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 24-42.

Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, *9*(03), 247-256.

Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(1), 80-88.

Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, *16*(4), 171-178.

Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, *3*(2), 111-119.

Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, *3*(17), 55-67.

Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *7*(1), 521-529.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *9*(2), 88-99.

Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, *14*(2), 120-125.

Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.

Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.

Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, *2*(1), 130-139.

Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in

Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, *17*(8).

Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, *5*(2), 32-37.

Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 52-72.

Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 198-205.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, *9*(2), 88-99.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *5*(2), 156-163.

Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *1*(2), 304-317.

Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, *7*(1), 1-9.

Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *1*(1), 120-126.

Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative GovernanceIn Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, *13*(1), 164-173.

Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, *3*(2), 231-237.

Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(2), 179-191.

Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *9*(1), 1-18.

TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, *6*, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, *14*(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, *6*(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, *1*(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, *5*(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Andry, H., & Yussa, T. (2020). Etika & Perilaku Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Anggara, S. (2016). Ilmu Adminsitrasi Negara. In Cv Pustaka Setia.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Retrieved from http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/Buku Pengantar Administrasi.

Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 5(4), 17–18. Retrieved from https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407.

Rahmayuni, S. (2017). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. 4. Retrieved from https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml.

Siagian, P. (2019). Filsafat Administraasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA.

Wijayanti, Z., Kismartini, K., & Sunu, R. (2013). Kolaborasi Dalam Sosialisasi Program Generasi Berencana Pada Pelaksanaan Pendewasaan Umur Pernikahan. Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan, 5 (2), 74–86. https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i2.280.